

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

PKT 2020



PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W11.U6/497/OT.01.1/2/2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ.TENRI MUSLINDA, SH.MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H.ABDUL KADIR, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 04 Februari 2020

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung




H.ABDUL KADIR, S.H., M.H.
NIP. 195407181981031008

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung



HJ.TENRI MUSLINDA, SH.MH
NIP. 196810181992122001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W11.U6/497/OT.01.1/2/2020
Pengadilan Negeri Bale Bandung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	90
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5

13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	15.379.462.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	395.643.000

Bandung, 04 Februari 2020

Ketua,



HJ. TENRI MUSLINDA, SH.MH
NIP. 196810181992122001